

Menkeu:

## 2017 tahun terbaik pengelolaan APBN

Selasa, 3 Juli 2018 16:11 WIB



*Arsip Foto. Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) didampingi Wamenkeu Mardiasmo (kanan) dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman (kiri) saat memberikan keterangan pers mengenai kinerja APBN 2018 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (17/5/2018). Menkeu menyatakan kinerja APBN hingga April 2018 mengalami perbaikan ke arah positif yang dilihat dari pertumbuhan pendapatan, hingga belanja negara yang mencapai Rp582,9 triliun atau 26,3 persen dari total belanja negara APBN 2018 sebesar Rp2.220,7 triliun. (ANTARA /Sigid Kurniawan)*

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat dengan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, mengemukakan bahwa tahun 2017 merupakan tahun terbaik dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017 dan pengelolaan perekonomian nasional sepanjang 2017 menunjukkan pencapaian-pencapaian yang positif, sehingga dapat dikatakan bahwa tahun 2017 merupakan tahun terbaik pengelolaan APBN," kata Sri Mulyani dalam rapat mengenai pokok-pokok Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017.

Sri Mulyani mengatakan APBN pada prinsipnya merupakan instrumen penting dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Capaian positif dari pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2017, menurut dia, antara lain

terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia yang mencapai angka 70,81 atau meningkat 0,9 persen dari IPM 2016.

Selain itu juga tampak dari tingkat pengangguran terbuka 2017 yang tercatat 5,13 persen, atau lebih rendah dibanding tingkat pengangguran terbuka 2016 yang sebesar 5,50 persen. Jumlah penduduk miskin juga turun 910.000 menjadi 26,58 juta dari tahun 2016 yang sebanyak 27,76 juta. Rasio gini juga membaik menjadi 0,391 dari 0,393 pada 2016.

"Capaian angka Indeks Pembangunan Manusia 2017 merupakan angka tertinggi dalam empat tahun terakhir. Sedangkan angka tingkat pengangguran terbuka pada 2017 merupakan yang terendah dalam tiga tahun terakhir," kata Sri Mulyani.

Jumlah penduduk miskin dan rasio gini pada 2017, ia melanjutkan, juga merupakan yang terendah sejak 2014.

Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Baca juga: [Pemerintah janji perbaiki pengelolaan APBN](#)

Pewartanya: Roberto Calvinantya Basuki

Editor: Maryati